



**TAHUN 2022**

---

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH**

**PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI  
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Kebijakan Sarana Transformasi yang merupakan transformasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan merupakan salah satu Unit Kerja Pemerintah dibawah Badan Kebijakan Transportasi. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi berperan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan melalui pemberian masukan-masukan berkaitan dengan penetapan kebijakan terkait sarana transportasi pada pimpinan kementerian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah Daerah, BUMN dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Selain itu, terdapat pula peraturan turunan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai dasar transformasi kelembagaan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022 yang mengatur terbentuknya Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

Saat ini Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020 – 2024 masih dalam tahap penyusunan sehingga yang menjadi dasar analisa capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 adalah Indikator Kinerja (IK) yang tercantum dalam Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024. Capaian kinerja untuk beberapa Indikator yang masih terkait fungsi penelitian dan pengembangan telah dihilangkan sehubungan dengan adanya peralihan anggaran maupun tugas dan fungsi kelitbang ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) per bulan Agustus 2022.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan ini yang akan dijadikan dasar Penyusunan Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020 – 2024.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi telah menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP-BLT 65 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022. Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam surat keputusan tersebut akan dijadikan dasar pengukuran capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi apabila Renstra Badan Kebijakan Transportasi telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar dokumen perencanaan Badan Kebijakan Transportasi maupun dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan tetap terintegrasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pencapaian kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi tidak dapat dihitung (NA) dikarenakan transformasi Badan Litbang Perhubungan Menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga seluruh kegiatan serta anggarannya dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- b. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi pada (t-2), t adalah tahun IKP pada Tahun 2020 sebesar 60%
- c. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi tidak dapat dihitung (NA) dikarenakan transformasi Badan Litbang Perhubungan Menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga seluruh kegiatan serta anggarannya dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- d. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi tidak dapat dihitung (NA) dikarenakan transformasi Badan Litbang Perhubungan Menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga seluruh kegiatan serta anggarannya dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- e. Realisasi Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi tidak dapat dihitung (NA) dikarenakan transformasi Badan Litbang Perhubungan Menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga seluruh kegiatan serta anggarannya dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- f. Realisasi Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi pada t-2 sebesar 50%
- g. Realisasi Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi sebesar 97,10%
- h. Indeks tingkat maturitas SPIP Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danu dan Penyeberangan pada Tahun 2022 sebesar 3

Realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.8.028.773.168,00. Apabila dibandingkan dengan pagu sebesar Rp.8.056.823.000,00 maka capaian daya serap hingga Tahun 2022 sebesar 99,65%. Mulai TA 2022, proses penganggaran dan pencairan belanja pegawai diserahkan kepada unit Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. Pada TA 2022, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi tidak mengalokasikan belanja modal, sehingga seluruh pagu anggaran yang diusulkan merupakan belanja barang.

## KATA PENGANTAR

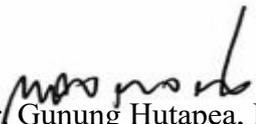
Puji syukur Alhamdulillah, atas segala karunia-Nya, karena *Laporan Monitoring Capaian Kinerja* Pusat Kebijakan Sarana Transportasi yang merupakan transformasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Tahun 2022 dapat terselesaikan. Laporan ini menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

LKIP disusun sebagai implementasi dari Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang selanjutnya dijabarkan di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyusunan LKIP. Sistematika pelaporan LKIP disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP ini berisikan pendahuluan, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan kegiatan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2022. Laporan ini sekaligus juga merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pusat Kebijakan Sarana Transportasi serta sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pada tahun mendatang.

Akhirnya semoga Tuhan YME selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Pusat Sarana Transportasi

  
Dr. Ir. Gunung Hutapea, M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630925 199303 1 001

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi .....	1
1.3. Organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi .....	2
1.4. Sistematika Pelaporan.....	4
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>5</b>
2.1 Dokumen Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan .....	5
2.2 Rencana Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2022 .....	8
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	10
<b>DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA</b> .....	<b>13</b>
3.1. Tahapan Pengukuran Kinerja.....	13
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja .....	14
3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Tahun 2022.....	15
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Tahun 2022 serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian .....	17
1.5. Analisis Sumber Daya Keuangan dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	25
<b>PENUTUP</b> .....	<b>27</b>
4.1. Kesimpulan .....	27
4.2. Saran .....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>31</b>
Lampiran 1 .....	32
Lampiran 2 .....	34

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kegiatan Pusat Kebijakan Sarana Tahun 2022 .....	8
Tabel 2 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024.....	11
Tabel 3 Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) .....	14
Tabel 4 Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan .....	15
Tabel 5 Rincian Target dan Realisasi IKK Tahun 2022.....	16
Tabel 6 Rincian Target dan Realisasi IKK 1 dan 2 Tahun 2022 .....	18
Tabel 7 Rincian Target dan Realisasi IKK 3 dan 4 Tahun 2022 .....	20
Tabel 8 Rincian Target dan Realisasi IKK 5 dan 6 Tahun 2022 .....	21
Tabel 9 Rincian Target dan Realisasi IKK 7 Tahun 2022.....	22
Tabel 10 Rincian Target dan Realisasi IKK 8 Tahun 2022.....	24
Tabel 11 Rencana dan Realisasi Anggaran.....	25
Tabel 12 Rincian Output dan Anggaran IKK Tahun 2022.....	25
Tabel 13 Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Target PK Tahun 2022 .....	27
Tabel 14 Capaian Daya Serap Per-Jenis Belanja Tahun 2022.....	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi .....	4
Gambar 2 Peta Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan .....	6
Gambar 3 <i>Cascading</i> Lintas Unit Eselon 1 sebagai Proses <i>Mirroring</i> dengan .....	7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Kebijakan Sarana Transportasi tahun 2022 disusun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara. Mulai dari Eselon II keatas harus mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Saat ini, seluruh dokumen terkait dengan kinerja pemerintah harus dipertanggungjawabkan yang tertuang dalam SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disingkat SAKIP) dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.2. Tugas dan Fungsi**

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, pada bagian kesepuluh ditegaskan bahwa tugas Pusat Kebijakan Sarana Transportasi adalah melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
2. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
3. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang sarana transportasi;
4. penyiapan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang sarana transportasi;
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
6. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
7. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

### 1.3. Organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Untuk menunjang tugas dan fungsi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sesuai dengan PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan susunan Organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi berserta fungsinya sebagai berikut:

1. Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;

a. Tugas

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- 4) penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian; dan
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian.

Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan

a. Tugas

Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan.

b. Fungsi

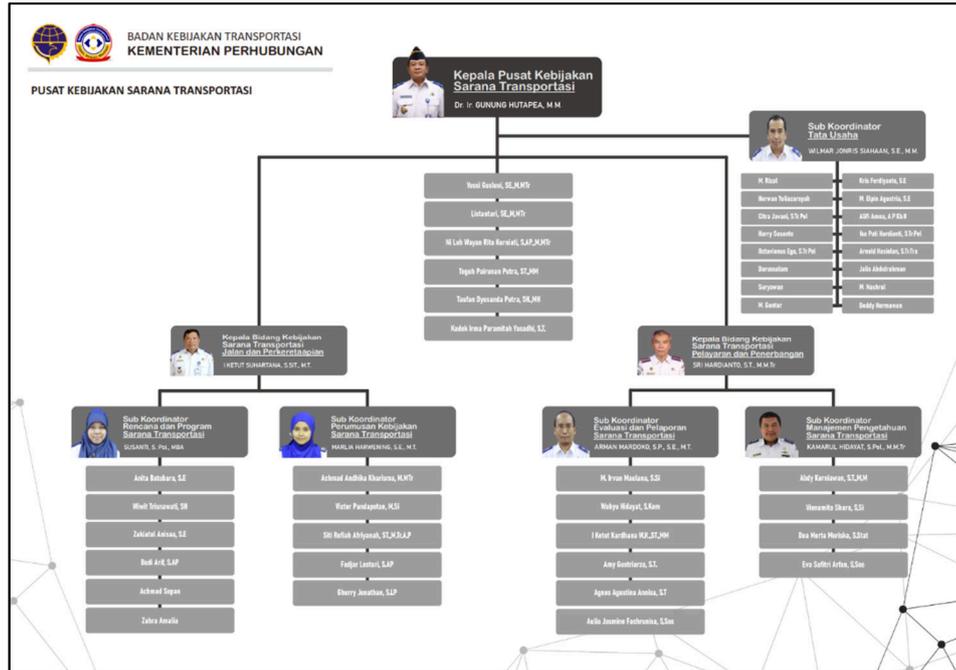
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- 4) Penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan.

Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan struktural organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi yang ada sekarang, komposisi jabatan struktural terdiri dari 1 orang Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi (eselon II), 2 orang eselon III, dan Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sesuai dengan PM No. 17 Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Berdasarkan PM 17 Tahun 2022

#### 1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan  
Bab ini menyajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi
2. Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2022 uraian mengenai pengukuran kinerja organisasi
3. Bab III Data Dan Analisis Capaian Kinerja
  - a. Tahapan Pengukuran Kinerja
  - b. Pengukuran Capaian Kinerja
  - c. Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Tahun 2022
  - d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Tahun 2022 serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian
  - e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021
  - f. Analisis Sumber Daya Keuangan
  - g. Capaian Keberhasilan Kinerja Lainnya
  - h. Realisasi Anggaran Tahun 2022
4. Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Dokumen Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Selain itu, terdapat pula peraturan turunan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai dasar transformasi kelembagaan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022. Saat ini Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020 – 2024 masih dalam tahap penyusunan sehingga yang menjadi dasar analisa capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 adalah Indikator Kinerja (IK) yang tercantum dalam Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024. Capaian kinerja untuk beberapa Indikator yang masih terkait fungsi penelitian dan pengembangan telah dihilangkan sehubungan dengan adanya peralihan anggaran maupun tugas dan fungsi kelitbang ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) per bulan Agustus 2022.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi telah menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP-BLT 65 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022. Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam surat keputusan tersebut akan dijadikan dasar pengukuran capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi apabila Renstra Badan Kebijakan Transportasi telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar dokumen perencanaan Badan Kebijakan Transportasi maupun dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan tetap terintegrasi.

Dengan mendasarkan hal tersebut Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi melanjutkan Visi dan Misi Badan Litbang Perhubungan yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari Misi Badan Kebijakan Transportasi dengan memperhatikan Visi. Untuk mewujudkan Misi Badan Kebijakan Transportasi, maka Tujuan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

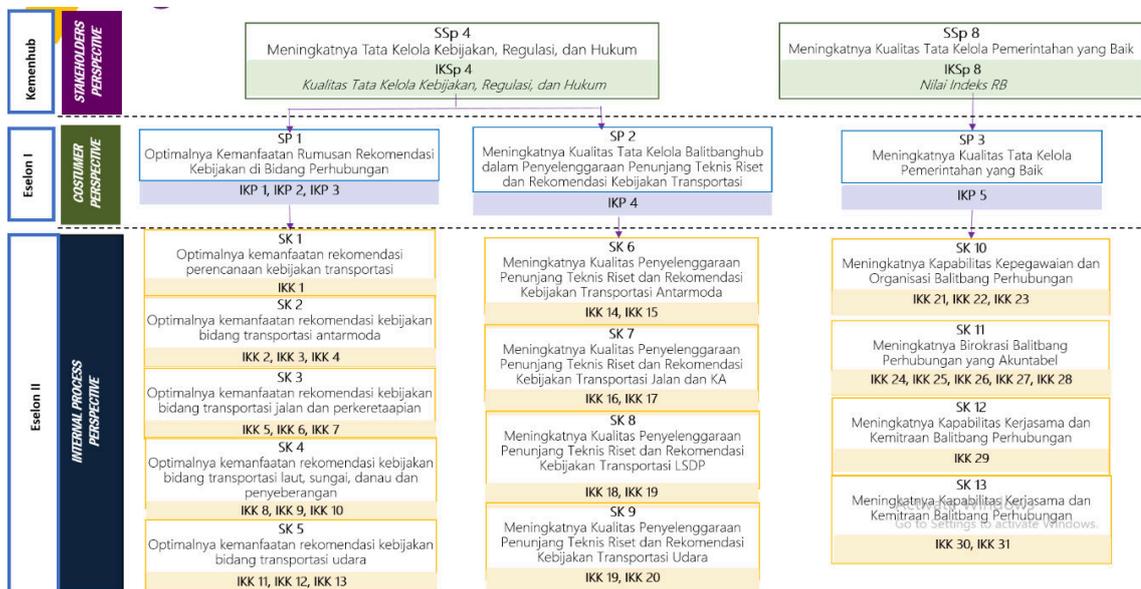
1. Terwujudnya dukungan Badan Kebijakan Transportasi dalam pemberian rekomendasi kebijakan strategis perhubungan.

2. Terwujudnya dukungan tata kelola Badan Kebijakan Transportasi untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik.

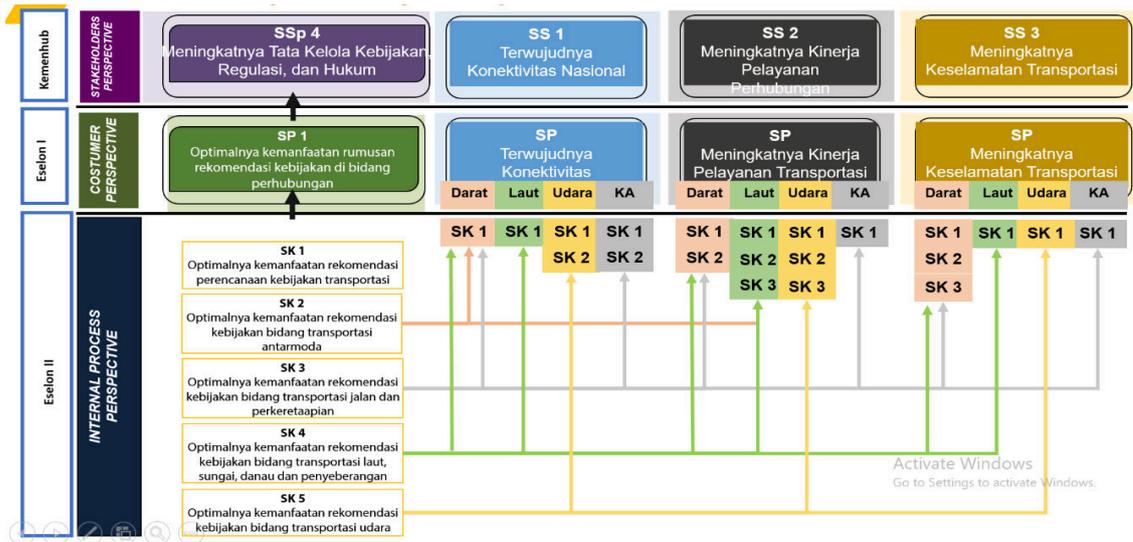
Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator output Badan Kebijakan Transportasi. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya prosentase tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan termasuk isu strategis di bidang perhubungan menjadi 39% pada tahun 2024;
2. Meningkatnya prosentase tingkat ketersediaan dukungan tata kelola Badan Kebijakan Transportasi melalui penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi menjadi 100% pada tahun 2024.

Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Sasaran Program ini dirumuskan dari Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, Visi, Misi, dan Tujuan Badan Kebijakan Transportasi serta memperhatikan permasalahan dan rencana capaian pada tahun 2020-2024. Penjabaran menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal proses perspective* dan *learning and growth perspective* sebagai berikut:



Gambar 2 Peta Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan



**Gambar 3 Cascading Lintas Unit Eselon 1 sebagai Proses *Mirroring* dengan Sub Sektor Kementerian Perhubungan**

Adapun Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sasaran Program Pertama (SP.1) yang akan dicapai adalah optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan,
- b. Sasaran Program Kedua (SP.2) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas tata kelola Badan Kebijakan Transportasi dalam penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi
- c. Sasaran Program Ketiga (SP.3) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik,

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit eselon II, khususnya Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut:

- a. Sasaran Kegiatan Pertama (SK.1) yang akan dicapai adalah optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang transportasi, yang diampu oleh Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:
  - 1) IKK 1 : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi
  - 2) IKK 2 : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi pada t-2
  - 3) IKK 3 : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi
  - 4) IKK 4 : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi
  - 5) IKK 5 : Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan,

- dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusiannya di bidang transportasi
- 6) IKK 6 : Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusiannya di bidang transportasi pada t-2
- b. Sasaran Kegiatan Kedua (SK.2) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan sarana transportasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:
- 1) IKK 7 : Indeks penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi.
  - 2) IKK.8 : Tingkat Maturitas SPIP

## 2.2 Rencana Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2022

Setiap kegiatan yang diuraikan dalam KRO dan RO memiliki korelasi dengan sasaran program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024. Sasaran program pertama yaitu optimalnya kemanfaatan rumusan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan dan sasaran program kedua yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Badan Kebijakan Transportasi dalam penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi diuraikan menjadi kegiatan yang terklasifikasi dalam KRO Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana. Adapun sasaran program ketiga meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik diuraikan ke dalam program dukungan manajemen. Rincian korelasi antara sasaran program dan restrukturisasi program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Transformasi Badan Litbang Perhubungan Menjadi Badan Kebijakan Transportasi membuat dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Badan Kebijakan Transportasi, program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan Sarana Transportasi adalah melakukan kajian analisis kebijakan serta kegiatan program dukungan manajemen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Rencana Kegiatan Pusat Kebijakan Sarana Tahun 2022

Kode	Kegiatan/Subkegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
022.11.WA	Program Dukungan Manajemen
4653	Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Riset Kebijakan
4653.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
4653.EBA.994	Layanan Perkantoran

Kode	Kegiatan/Subkegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
<b>002</b>	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</b>
A	Perbaikan Peralatan Kantor
B	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2
C	Langganan Daya dan Jasa
D	Operasional Perkantoran
E	Honor Pramubakti dan Supir
F	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
G	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
H	Honor Pengelola Keuangan
<b>4653.EBD</b>	Layanan Manajemen Kinerja Internal
<b>4653.EBD.952</b>	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
<b>102</b>	Administrasi Penyusunan Rencana
A	Penyusunan Database Penelitian dan Analisa Kebijakan
<b>103</b>	Administrasi Penyusunan Program
A	Penyusunan Program, Rencana Anggaran Dan Rencana Kinerja Tahunan Bidang Transportasi
<b>104</b>	Administrasi Kerjasama Penelitian dan Kajian Isu Strategis
A	Koordinasi Dan Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Bidang Transportasi
B	Koordinasi Monitoring, Analisa Dan Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Lebaran
C	Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Studi
D	Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Sektor Transportasi
E	Webinar dan Focus Group Discussion
<b>4653.EBD.953</b>	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
<b>101</b>	Administrasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan
A	Penyelenggaraan SAKIP Bidang Transportasi
B	Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
<b>4653.EBD.974</b>	Layanan Penyelenggaraan Kearsiapan
<b>101</b>	Penataan Dokumen Tata Usaha Badan Kebijakan Transportasi
A	Administrasi Satuan Kerja , Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
B	Dministrasi Pengelolaan Ketatausahaan, Umum dan SDM Penunjang Teknis Transportasi
<b>4655</b>	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan
<b>4655.EBA</b>	Layanan Dukungan Manajemen Internal
<b>4655.EBA.958</b>	Layanan Hubungan Masyarakat
<b>101</b>	Administrasi Publikasi Kepustakaan dan Kehumasan
A	Penyusunan Dan Penerbitan Jurnal Penelitian Transportasi

Sumber : RKAKL Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2022

Pagu Anggaran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi untuk tahun 2022 sebesar Rp. 8.056.823.000,00 (delapan miliar lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

### 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pengesahan dari Rencana Kerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) sebagai penjabaran rencana strategis yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicators*) yang relevan. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun kedepan.

Penetapan kinerja merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasinya. Rencana Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance agreement*) ataupun *Service Agreement* dan merupakan dokumen "Kontrak" antara pimpinan unit organisasi (Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi) dengan pimpinan Badan Kebijakan Transportasi.

Saat ini Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020 – 2024 masih dalam tahap penyusunan sehingga yang menjadi dasar analisa capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 adalah Indikator Kinerja (IK) yang tercantum dalam Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024. Capaian kinerja untuk beberapa Indikator yang masih terkait fungsi penelitian dan pengembangan telah dihilangkan sehubungan dengan adanya peralihan anggaran maupun tugas dan fungsi kelitbang ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) per bulan Agustus 2022. Berdasarkan hal tersebut dokumen Rencana Strategis Pusat Kebijakan Sarana Transportasi masih menggunakan Rencana Strategis Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Tahun 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	META INDIKATOR	TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024		
SK1	Optimalnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang sarana transportasi	<i>Initial</i>								
		<b>IKK 1</b>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	Prosentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi yang diterima oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	75	75	80	85	90
		<i>Intermediate</i>								
		<b>IKK 2</b>	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi pada (t-2)	%	Prosentase rekomendasi kebijakan bidang transportasi pada (t-2) yang diterima dan dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	35	36	37	38	39
		<i>Initial</i>								
		<b>IKK 3</b>	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi	%	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi yang diterima oleh Menteri, sub sektor Perhubungan, dan stakeholders	75	75	80	85	90
		<i>Intermediate</i>								
		<b>IKK 4</b>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	30	30	30	32	32
		<i>Initial</i>								
		<b>IKK 5</b>	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan & dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi	%	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya Bidang transportasi yang diterima oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan	75	75	80	85	90
<i>Intermediate</i>										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	META INDIKATOR	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
		<b>IKK 6</b>	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi pada t-2	%	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang transportasi yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan pada t-2	30	31	32	33	34
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	<b>IKK 7</b>	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	Persentase penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	80	80	85	85	90
	Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Sarana Transportasi	<b>IKK 8</b>	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	Penilaian BPKP	3	3	3	3	3

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Puslitbang Transportasi Laut, SDP Tahun 2020-2024

## **BAB III**

### **DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

#### **3.1. Tahapan Pengukuran Kinerja**

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian kinerja suatu organisasi melalui upaya-upaya strategis dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan atau sebaliknya menjadi kegagalan suatu organisasi. Penilaian akuntabilitas kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi dilakukan melalui pengukuran terhadap capaian kinerja setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dengan cara membandingkan realisasi yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah direvisi.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Pengukuran Kinerja diawali dengan identifikasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang terbaru dari Perjanjian Kinerja Revisi Ketiga yang diukur tiap bulan, triwulan maupun tahunan.

Tahapan pengukuran kinerja saat ini dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis web, yakni *e-performance* dengan alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk monitoring kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, II, III mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya.

Sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan monitoring capaian target realisasi, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi menyusun Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan perbulan. Laporan Rencana Aksi Kinerja disusun dalam bentuk kertas kerja yang berisikan format tabel target dan realisasi kinerja yang dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut yang disusun setiap bulannya. Disamping itu, disusun juga laporan evaluasi terhadap program kegiatan yang diukur setiap triwulan sebagai bentuk monitoring kinerja target dan realisasi anggaran.

Monitoring capaian kinerja *output* kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id> dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan aplikasi e-Monev PP 39 dengan alamat <http://emonev.bappenas.go.id>.

### 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi dilihat berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target rencana dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif.

Pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap Indikator Kinerja Kegiatan dituangkan didalam manual IKK untuk panduan menghitung capaian kinerja, yang mencakup tentang pengertian, kriteria dan formula. Berikut disampaikan target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2022.

**Tabel 3 Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
IKK 1	<i>Initial Outcome</i>		
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	80
IKK 2	<i>Intermediate Outcome</i>		
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi pada (t-2)	%	37
IKK 3	<i>Initial Outcome</i>		
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	80
IKK 4	<i>Intermediate Outcome</i>		
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	30
IKK 5	<i>Initial Outcome</i>		
	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi	%	80
IKK 6	<i>Intermediate Outcome</i>		
	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi pada t-2	%	32
IKK 7	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	85

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3

Sumber : Rencana Strategis Puslitbang Transportasi LSDP, 2022

### 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Tahun 2022

Pusat Kebijakan Sarana Transportasi telah rampung menyelesaikan kinerja pada kurun triwulan ke-4. Kinerja pada Triwulan IV tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan terkendala anggaran, khususnya terkait kegiatan penelitian dan penunjang penelitian. Berikut disampaikan capaian kinerja triwulan IV dalam tabel berikut.

**Tabel 4 Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Target PK Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI TW IV	CAPAIAN KINERJA (%)
<i>Initial Outcome</i>				
IKK 1	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	80	NA
<i>Intermediate Outcome</i>				
IKK 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi pada (t-2)	%	37	60
<i>Initial Outcome</i>				
IKK 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	80	NA
<i>Intermediate Outcome</i>				
IKK 4	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	30	NA
<i>Initial Outcome</i>				
IKK 5	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi	%	80	NA
<i>Intermediate Outcome</i>				

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK	REALISASI TW IV	CAPAIAN KINERJA (%)
IKK 6	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK & Sumber Daya Manusianya bidang transportasi pada t-2	%	32	50	156,25
IKK 7	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	85	97,10	114,24
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3	3	100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					133,17

Sumber : Puslitbang LSDP, Diolah, 2022

Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi dan dipusatkannya seluruh tugas dan tanggung jawab penelitian kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional membuat seluruh kegiatan penelitian di Badan Litbang Perhubungan ditiadakan, Seluruh anggaran penelitian dan penunjang penelitian juga telah dialihkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal ini berdampak pada perlunya penyesuaian capaian target dan realisasi pada IKK 1, IKK 3, IKK 4, dan IKK 5 yang merupakan indikator kinerja terkait kegiatan penelitian. Secara rinci, penyesuaian target dan realisasi dari output dan anggaran per IKK disampaikan pada Tabel 5.

**Tabel 5 Rincian Target dan Realisasi IKK Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
<i>Initial Outcome</i>								
IKK 1	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<i>Intermediate Outcome</i>								
IKK 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi pada (t-2)	%	37	37	37	60	60	60
<i>Initial Outcome</i>								
IKK 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<i>Intermediate Outcome</i>								

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 4	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<i>Initial Outcome</i>								
IKK 5	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<i>Intermediate Outcome</i>								
IKK 6	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi pada t-2	%	32	32	32	50	50	50
IKK 7	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	75	80	85	85	90	97,1
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	indeks	3	3	3	3	3	3

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, seluruh capaian kinerja dapat melampaui target pada Triwulan IV. Penetapan target pada Triwulan IV disesuaikan dengan kondisi Badan Kebijakan Transportasi yang bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi.

### 3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Tahun 2022 serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian

Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi memberikan dampak terhadap pembagian tugas dan fungsi instansi antara Badan Litbang Perhubungan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kondisi ini berpengaruh kepada persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terhadap kegiatan dan anggaran Badan Litbang Perhubungan saat ini, khususnya terkait penelitian dan penunjang penelitian. Pada triwulan IV seluruh anggaran penelitian Badan Kebijakan Transportasi telah diserahkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga seluruh kegiatan penelitian Badan Litbang Perhubungan juga telah dihapuskan.

### 3.4.1 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi

IKK 1 merupakan indikator kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi terkait dengan penelitian yang terdampak secara signifikan dikarenakan adanya pengalihan fungsi penelitian kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional. IKK 1 dan 2 merupakan capaian penelitian kebijakan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 (*initial*) dan 2020 (*intermediate*). Capaian IKK 1 dan 2 sampai dengan Triwulan IV sebesar NA dan 60%. Capaian dan target untuk IKK 1 tidak dapat dinilai dikarenakan Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi dan dipusatkannya seluruh tugas dan tanggung jawab penelitian kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional membuat seluruh kegiatan penelitian di Badan Litbang Perhubungan ditiadakan, Seluruh anggaran penelitian dan penunjang penelitian juga telah dialihkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Tabel 6 Rincian Target dan Realisasi IKK 1 dan 2 Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 1	<i>Initial Outcome</i>							
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IKK 2	<i>Intermediate Outcome</i>							
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi pada (t-2)	%	37	37	37	60	60	60

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2022

Berikut penjelasan pencapaian target IKK 1 dan IKK 2 Triwulan IV Pusjak Sarana Transportasi.

1. Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Hal ini berdampak pada anggaran kegiatan penelitian dan penunjang penelitian yang dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. IKK 1 merupakan salah satu indikator yang terdampak secara signifikan.
2. Pelaksanaan kegiatan monitoring kemanfaatan hasil penelitian Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dilaksanakan melalui koordinasi hasil tindak lanjut penelitian antara Pusat Kebijakan Sarana Transportasi bersama dengan stakeholder terkait. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan rapat pembahasan rencana tindak lanjut studi dengan stakeholder terkait diantaranya :
  - a. Pembahasan Desain Kapal Negara bersama KPLP dan mengundang PT. Darma Kreasi Nusantara selaku konsultan

penyusun studi. KPLP saat ini dalam proses pengusulan pembangunan kapal. Secara detail, kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Koodinasi melalui surat terkait kemanfaatan studi, sebagai tindak lanjut undangan dari KPLP terkait studi Desain Kapal Negara
  - 2) Rapat pembahasan tindak lanjut studi dan rencana pembangunan kapal patroli
  - 3) Koordinasi dan komunikasi melalui surat terkait kebutuhan updating spesifikasi teknis kapal.
  - 4) Keikutsertaan Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam acara *Stakeholders Workshop* pada tanggal 14 – 17 Juni 2022 untuk pembahasan Pembangunan Kapal Kelas 1 oleh KPLP.
- b. Pembahasan potensi pengoperasian Wing In Ground untuk menunjang pariwisata. Kegiatan yang telah dilakukan adalah rapat kooordinasi dengan Institute Teknologi Sepuluh November (ITS) untuk menindaklanjuti pemanfaatan studi sebagai bahan literasi di jurusan Teknik Kelautan dalam pembelajaran berkaitan dengan tekno-ekonomi serta studi lainnya terkait tata kelola, proses bisnis dan uji layanan transportasi. Rapat koordinasi berlangsung pada 27 Juli 2022, di Surabaya.
- c. Pembahasan potensi pengoperasian Bus Tanah Air Indonesia untuk keperintisan dan pariwisata dengan stakeholder terkait. Kegiatan yang telah dilakukan rapat kooordinasi dengan Institute Teknologi Sepuluh November (ITS) untuk menindaklanjuti pemanfaatan studi sebagai bahan literasi di jurusan Teknik Kelautan dalam pembelajaran berkaitan dengan tekno-ekonomi serta studi lainnya terkait tata kelola, proses bisnis dan uji layanan transportasi. Rapat koordinasi berlangsung pada 27 Juli 2022, di Surabaya

#### **3.4.2. Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi LSDP**

Berbeda dengan IKK lainnya, *intermediate outcome* pada IKK 4 merupakan tingkat kemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan, yaitu tahun 2022. IKK 3 dan 4 merupakan penelitian strategis yang diusulkan melalui penugasan atau isu-isu yang membutuhkan rekomendasi penelitian secara cepat. Dikarenakan Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi dan dipusatkannya seluruh tugas dan tanggung jawab penelitian kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional membuat seluruh

kegiatan penelitian di Badan Litbang Perhubungan ditiadakan, Seluruh anggaran penelitian dan penunjang penelitian juga telah dialihkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga, membuat Capaian IKK 3 dan 4 pada Triwulan IV tidak dapat di hitung.

**Tabel 7 Rincian Target dan Realisasi IKK 3 dan 4 Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 3	<i>Initial Outcome</i>							
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IKK 4	<i>Intermediate Outcome</i>							
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2022

Berikut penjelasan pencapaian target IKK 3 dan IKK 4 Triwulan IV Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

1. Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Hal ini berdampak pada pengalihan anggaran kegiatan penelitian dan penunjang penelitian Badan Litbang Perhubungan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. IKK 3 merupakan salah satu indikator yang berdampak secara signifikan.
2. Dikarenakan tidak ada kegiatan penyerahan kajian strategis (IKK 3), maka IKK 4 tidak dapat dilaksanakan dan dipantau capaiannya.

### 3.4.3. Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, Dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang Transportasi

IKK 5 merupakan indikator kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi terkait dengan penelitian yang berdampak secara signifikan oleh proses transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi. IKK 5 dan 6 merupakan capaian penelitian evaluasi yang dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola pada tahun anggaran 2022 (*initial*) dan 2020 (*intermediate*). Capaian IKK 5 dan 6 sampai dengan Triwulan IV sebesar 0% dan 50%. Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi dan dipusatkannya seluruh tugas dan tanggung jawab penelitian kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional membuat seluruh kegiatan penelitian di Badan Litbang Perhubungan ditiadakan, Seluruh anggaran penelitian dan penunjang penelitian juga telah dialihkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Hal ini membuat seluruh kegiatan IKK 5 telah dihapuskan di Tahun 2022. Capaian dan target untuk IKK 6 sudah melebihi dari target yang telah ditentukan di Tahun 2022.

**Tabel 8 Rincian Target dan Realisasi IKK 5 dan 6 Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 5	<i>Initial Outcome</i>							
	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi LSDP	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IKK 6	<i>Intermediate Outcome</i>							
	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi LSDP pada t-2	%	32	32	32	50	50	50

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2022

Sama halnya dengan IKK 1, kegiatan IKK 5 tidak dapat dilakukan dikarenakan Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Hal ini berdampak pada dialihkannya anggaran kegiatan penelitian dan penunjang penelitian Badan Litbang Perhubungan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan rapat pembahasan rencana tindak lanjut studi Potensi Pengembangan *Traffic Separation Schemes* (TSS) di Teluk Balikpapan dengan mengundang Inspektur III Itjen Kementerian Perhubungan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Balikpapan dan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Balikpapan.

#### **1.4.4. Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Pada Tahun Anggaran 2022, kegiatan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan terdiri dari kegiatan penunjang penelitian dan dukungan manajemen. Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi membuat kegiatan penunjang penelitian tidak dilaksanakan pada Triwulan IV dikarenakan dialihkannya seluruh anggaran dan kegiatan terkait penelitian kepada

Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga capaian kinerja IKK 7 sebesar 97,1%.

**Tabel 9 Rincian Target dan Realisasi IKK 7 Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
IKK 7	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	%	75	80	85	85	90	97,1

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2022

Beberapa capaian IKK 7 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi yaitu:

1. Kegiatan penyusunan dokumen Program dan Evaluasi.
  - a. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022
  - b. Penyusunan Dokumen RKAKL Tahun 2022
  - c. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
  - d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021
  - e. Laporan Tahunan Tahun 2021
  - f. Penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahun 2022
  - g. Penyusunan dokumen Rencana Aksi Bulanan Tahun 2022
  - h. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
  - i. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
  - j. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
  - k. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV
  - l. Laporan Identifikasi kegiatan prioritas yang akan diajukan dalam PAGU indikatif TA 2023.
  - m. Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.
2. Kegiatan penyusunan Laporan Tata Usaha dan Keuangan
  - a. Laporan Keuangan Tahun 2021
  - b. Laporan Administrasi Kepegawaian Tahun 2021
  - c. Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2022 Semester I
  - d. Laporan BMN Tahun 2022
3. Kegiatan webinar dengan tema Angkutan Kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Dryport Cikarang Serta Efisiensi Logistik Di Wilayah Jabodetabek Dan Pelabuhan Patimban Sebagai Alternatif.
4. Terbitnya 2 edisi Jurnal Transportasi.
5. Kegiatan kerjasama penelitian dan kajian isu strategis
  - a. Monitoring Angkutan Lebaran 2022.
  - b. Pelaksanaan Kerjasama Antara Badan Kebijakan Transportasi dengan PT PAL Indonesia terkait hasil Rekomendasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi tentang pembuatan desain lashing yang ideal guna mengatasi permasalahan yang terjadi dilapangan.

6. Penyusunan Database Perpustakaan Hasil Kajian Pusat Kajian Sarana Transportasi.
7. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Evaluasi Tol Laut.
8. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan PNBPN pada Transportasi Laut.
9. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penataan Tersus/TUKS.

Selain kegiatan di atas, Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan telah melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan IM No. 8 Tahun 2021 dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Penyeberangan telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Surat Bapak Badan Kebijakan Transportasi No. UM 006/09/05/BLT/2022 Tanggal 5 Juli 2022, dengan butir-butir kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan penyeberangan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah berlangsung selama 4 (Empat) tahun. Namun sampai saat ini, kebutuhan Sumber Daya manusia dalam pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran untuk angkutan penyeberangan belum terpenuhi.
2. Kebijakan Instruksi Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Operasional Angkutan Penyeberangan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 122 Tahun 2018 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera Menyusun Road Map pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai kebutuhan masing-masing Pelabuhan Penyeberangan.
4. Mempertimbangkan jangka pemenuhan rencana Road Map yang membutuhkan waktu cukup lama, maka perlu diambil langkah-langkah berikut:
  - a. Mengembalikan fungsi keselamatan pelayaran menjadi otoritas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  - b. Organisasi Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menjadi bagian dari organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Selain Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan IM No. 8 Tahun 2021 dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Penyeberangan, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi juga melakukan Kerjasama dengan PT.PAL terkait rekayasa lashing kapal. Kesimpulan dari kegiatan

Kerjasama tersebut adalah terlaksananya perjanjian Kerjasama antara PT.PAL dengan Badan Kebijakan Transportasi dalam upaya untuk merekayasa proses Lashing agar dapat berjalan dengan cepat dan efisien.

#### 1.4.4. Tingkat Maturitas SPIP

Berdasarkan hasil penilaian kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) Tahun 2021, Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan tidak terdapat kelemahan sehingga tidak ada rencana tindak perbaikan yang perlu dilakukan untuk kedelapan unsur lingkungan pengendalian.

Pada tahun 2021, berdasarkan hasil penilaian Penjamin Kualitas Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Perhubungan, Kementerian Perhubungan berhasil mempertahankan nilai SPIP dengan indeks 3 atau terdefinisi. Kementerian Perhubungan masih perlu menunggu hasil penilaian SPIP oleh instansi pembina yaitu BPKP.

Kegiatan Pleno Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022. Dan selanjutnya dilaksanakan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal.

**Tabel 10 Rincian Target dan Realisasi IKK 8 Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET			REALISASI		
			Jul	Aug	Sep	Jul	Aug	Sep
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	indeks	3	3	3	3	3	3

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2022

Hasil Penjaminan Kualitas SPIP disampaikan pada Triwulan III & IV, sehingga pencapaian kinerja IKK 8 belum dapat dilaporkan. Berdasarkan hasil Evaluasi SPIP Tahun 2022, telah dilaksanakan upaya perbaikan seperti :

1. Pembuatan aplikasi sistem informasi terkait pengelolaan kegiatan manajemen risiko, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam penyimpanan data dan optimalisasi pemantauan rencana tindak pengendalian.
2. Pembuatan sistem pelaporan dan kinerja serta dokumentasi secara digital dan *online*, baik untuk mendukung kegiatan strategis maupun untuk kegiatan rutin.

Dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan SPIP, perlu dilakukan perbaikan berikut yaitu:

1. Penyiapan data dukung Kertas Kerja Evaluasi SPIP Tahun 2023 sejak dini.
2. Penyesuaian dokumen perencanaan terkait adanya perubahan organisasi, dari Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan

Kebijakan Transportasi, seperti : dokumen Renstra, RKT, PK, Manual IKK dan dokumen penganggaran.

3. Penerapan sistem yang telah ada.
4. Reviu SOP.

### 1.5. Analisis Sumber Daya Keuangan dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Pagu Anggaran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sebesar Rp.8.056.823.000,00. Sampai dengan Triwulan IV, realisasi anggaran sebesar Rp.8.028.773.000,00 atau 99,65% dibandingkan dengan total anggaran. Secara rinci tingkat penyerapan anggaran per bulan disampaikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 11 Rencana dan Realisasi Anggaran**

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	TK (Tingkat Penyerapan)
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	8.056.823.000,00	8.028.773.000,00	99,65%
Belanja Modal	-	-	-
Total	8.056.823.000,00	8.028.773.000,00	99,65%

Sumber: Aplikasi SMART (<http://monev.anggaran.depkeu.go.id>)

Anggaran Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada Tahun 2022 dalam mendukung ketercapaian IKK secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 12 Rincian Output dan Anggaran IKK Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	PAGU	Volume	TARGET		Realisasi Anggaran TW IV (Rp)
			Kinerja	Anggaran (Rp)	
IKK 1	<i>Initial Outcome</i>				
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	-	-	NA	-
IKK 2	<i>Intermediate Outcome</i>				
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi pada (t-2)	200.000.000	5 kajian	37%	200.000.000
IKK 3	<i>Initial Outcome</i>				
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	-	-	NA	-
IKK 4	<i>Intermediate Outcome</i>				
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	-	-	NA	-
	<i>Initial Outcome</i>				

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		PAGU	Volume	TARGET		Realisasi Anggaran TW IV (Rp)
				Kinerja	Anggaran (Rp)	
IKK 5	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi	-	-	NA	-	-
<i>Intermediate Outcome</i>						
IKK 6	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi pada t-2	99.715.000	2 kajian	32%	99.715.000	99.651.862
IKK 7	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	7.362.208.000	35 laporan	85%	7.362.208.000	7.334.276.361
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	394.900.000	Indeks (3)	Indeks (3)	394.900.000	394.844.945

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2022

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada Triwulan IV serta sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

Pencapaian kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi telah menggunakan target berbasis *outcome* yang telah sesuai dengan konsep Rencana Strategis 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada Tahun 2022 dibandingkan target tahunan pada tahun 2022 sebesar 133,17%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 13 Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Target PK Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK	REALISASI TW IV	CAPAIAN KINERJA (%)
IKK 1	<i>Initial Outcome</i>				
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	80	NA	NA
IKK 2	<i>Intermediate Outcome</i>				
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi pada (t-2)	%	37	60	162,2
IKK 3	<i>Initial Outcome</i>				
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	80	NA	NA
IKK 4	<i>Intermediate Outcome</i>				
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	30	NA	NA
IKK 5	<i>Initial Outcome</i>				
	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan	%	80	NA	NA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK	REALISASI TW IV	CAPAIAN KINERJA (%)
	Sumber Daya Manusianya bidang transportasi				
	<i>Intermediate Outcome</i>				
IKK 6	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK & Sumber Daya Manusianya bidang transportasi pada t-2	%	32	50	156,25
IKK 7	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	85	97,10	114,24
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3	3	100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					133,17

Sumber : Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2022

Kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja yaitu adanya implementasi manajemen kinerja yang baik melalui pengaturan kerjasama secara harmonis dan terintegrasi antara pimpinan dan pelaksana, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal guna mencapai target kinerja.

Realisasi anggaran Triwulan IV sebesar Rp.8.028.773.000,00. Apabila dibandingkan dengan pagu sebesar Rp. 8.056.823.000,00 maka capaian daya serap hingga triwulan IV sebesar 99,65%, dengan rincian belanja sebagai berikut.

**Tabel 14 Capaian Daya Serap Per-Jenis Belanja Tahun 2022**

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	TK (Tingkat Penyerapan)
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	8.056.823.000,00	8.028.773.000,00	99,65%
Belanja Modal	-	-	-
Total	8.056.823.000,00	8.028.773.000,00	99,65%

Sumber: Pusjak Sarana Transportasi, Diolah, 2022

#### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tahun 2021, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di Tahun 2022 seperti :

1. Dengan terbitnya PM No.17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka perlu dilakukan penyusunan Renstra, RKT, dan PK masing-masing Unit Eselon Eselon II / Pusat Kebijakan Sarana Transportasi di lingkungan Badan Kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan Dokumen Perencanaan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi hingga ke dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan.
2. Persiapan pembuatan *database* informasi tenaga ahli dan spesifikasi pembedangan keilmuan yang dimiliki seluruh mitra Pusat Kebijakan Sarana Transportasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menentukan mitra kerjasama penelitian
3. Pembuatan sistem pelaporan dan kinerja serta dokumentasi secara digital dan *online*, baik untuk mendukung kegiatan strategis maupun untuk kegiatan rutin.
4. Pembuatan aplikasi sistem informasi terkait pengelolaan kegiatan manajemen risiko, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam penyimpanan data dan optimalisasi pemantauan rencana tindak pengendalian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (Modul 1-5). 2000. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Ketetapan MPR-RI Nomor.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sekretariat MPR RI, Jakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1999. Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.
- Pedoman dan Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 2003. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jakarta.
- Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2004. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DALAM RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2020 - 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	META INDIKATOR	TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024		
SK1	Optimalnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang transportasi LSDP	<i>Initial</i>								
		<b>IKK 1</b>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	Prosentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi yang diterima oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	75	75	80	85	90
		<i>Intermediate</i>								
		<b>IKK 2</b>	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi pada (t-2)	%	Prosentase rekomendasi kebijakan bidang transportasi pada (t-2) yang diterima dan dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	35	36	37	38	39
		<i>Initial</i>								
		<b>IKK 3</b>	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi	%	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi yang diterima oleh Menteri, sub sektor Perhubungan, dan stakeholders	75	75	80	85	90
		<i>Intermediate</i>								
		<b>IKK 4</b>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	30	30	30	32	32
		<i>Initial</i>								
		<b>IKK 5</b>	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan & dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi	%	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya Bidang transportasi yang diterima oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan	75	75	80	85	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	META INDIKATOR	TARGET					
					2020	2021	2022	2023	2024	
			<i>Intermediate</i>							
		<b>IKK 6</b>	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya bidang transportasi pada t-2	%	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusiannya Bidang transportasi yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan pada t-2	30	31	32	33	34
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi LSDP	<b>IKK 7</b>	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	Persentase penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	80	80	85	85	90
		<b>IKK 8</b>	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	Penilaian BPKP	3	3	3	3	3

## Lampiran 2

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 1	Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	IKK 1	<i>Initial Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	80
		IKK 2	<i>Intermediate Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi pada (t-2)	%	37
		IKK 3	<i>Initial Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	80
		IKK 4	<i>Intermediate Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	30
		IKK 5	<i>Initial Outcome</i> Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi	%	80
		IKK 6	<i>Intermediate Outcome</i> Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi pada t-2	%	32
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi LSDP	IKK 7	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	85
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3

